BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang menarik untuk terus dikaji secara ilmiah permasalahannya, agar bisa merubah kehidupan masyarakat miskin ke arah yang lebih baik. Negara Indonesia telah mengamanatkan dalam kontstitusinya untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian konstitusi tersebut diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian diterjemahkan kembali secara detail oleh Menteri Sosial dalam bentuk pelaksanaan program yaitu PKH sebagaimana terdapat dalam Permensos RI Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di singkat dengan PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH oleh Kementrian Sosial (Permensos RI, 2018: 3).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu penerima Program PKH semenjak dimulainya Program PKH di Indonesia. Tabel 1.1 berikut untuk memperlihatkan data peserta PKH Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1
PESERTA PKH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	Kab/Kota	Tahun	
		2018	2019
1	Pesisir Selatan	16.351	15.891
2	Solok	16.597	15.955
3	Sijunjung	8.039	7.792
4	Kota Pariaman	2.509	2.433
5	Padang Pariaman	17.284	16.824
6	Agam	17.290	16.813
7	Solok Selatan	6.029	5.778
8	Tanah Datar	17.937	17.088
9	Lima Puluh Kota	17.965	17.110
10	Dharmasraya	5.085	4.952
11	Kota Solok	1.869	1.820
12	Kota Padang	20.289	18.318
13	Pasaman Barat	17.615	16.102
14	Kota Payakumbuh	4.181	3.887
15	Pasaman	12.677	12.713
16	Kota Sawahlunto	919	913
17	Mentawai	5.224	4.758
18	Padang Panjang	1.322	1.187
19	Kota Bukittinggi	1.665	1.473
Jumlah		**190.847**	**181.807**

Sumber Data: Data Base PPKH Provinsi Sumatera Barat Bulan Mei 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 terjadi penurunan kepesertaan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019. Dimana Tahun 2019 sebanyak 181.807, Sedangkan Tahun 2018 sebanyak 190.847. Artinya terjadi penurunan peserta PKH sebanyak 9.040. Adapun penurunan jumlah peserta PKH ini terjadi karena adanya Graduasi pada peserta PKH, baik itu dalam kategori status Graduasi Alamiah, Graduasi Mampu secara Ekonomi, dan Graduasi Mandiri atau suka rela.

Kemudian penulis menelusurinya kepada Koordinator Wilayah SDM PKH Sumatera Barat tentang kondisi peserta PKH yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Annisa, bahwa penurunan peserta PKH dikarenakan adanya terjadi Graduasi pada Peserta PKH. Baik itu Graduasi Alamiah karena kehabisan komponen kepesertaan, Graduasi mampu secara ekonomi karena meningkatnya perekonomian KPM, dan Graduasi Mandiri atau suka rela karena adanya

kesadaran dari KPM PKH untuk tidak lagi menerima bantuan PKH. Berdasarkan data yang dikumpulkan pendamping PKH dilapangan (Wawancara, 2019: 2 Juli Pukul 09.00 Wib).

Salah satu indikator dari berhasilnya program PKH adalah adanya peserta yang Graduasi dari PKH. Ketika berbicara tentang Graduasi pada PKH, maka Graduasi pada PKH itu dapat dikategorikan menjadi Graduasi Alamiah, Graduasi Mampu Secara Ekonomi dan Graduasi Mandiri atau Suka Rela. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan atau tidak ada lagi komponen PKH sebagai syarat untuk menerima bantuan PKH. Graduasi meningkat secara ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan PKH dikarenakan meningkatnya ekonomi peserta PKH. Graduasi Mandiri atau suka rela merupakan Graduasi yang disebabkan karena kesadaran secara pribadi oleh peserta PKH untuk tidak menerima lagi bantuan PKH (Surat Kemensos RI Nomor: 384/LJS.JSK.TU/03/2017 tentang Laporan Graduasi KPM PKH).

Provinsi Sumatera Barat yang sudah lama adanya program PKH seharusnya sudah banyak terjadi Graduasi khususnya Graduasi Mandiri, namun kenyataanya hal itu terjadi masih sedikit, bahkan Graduasi Mandiri baru lahir Tahun 2018 akhir. Untuk itu perlu kiranya ditelusuri lebih lanjut Graduasi Mandiri itu, agar bisa membantu peserta PKH dalam mencapai status tertinggi di PKH setelah berada pada arena PKH yaitu Graduasi Mandiri.

Bagi penulis, Graduasi Mandiri ini menarik untuk ditelusuri dan diteliti lebih lanjut dibandingkan dengan dua kategori Graduasi lainnya, karena Graduasi Alamiah untuk keluar dari kepesertaan PKH perlu menunggu waktu habis komponen bantuan, dan Graduasi mampu secara ekonomi menunggu meningkatnya perekonomian peserta sampai dinyatakan mampu oleh pihak program, sedangkan Graduasi Mandiri merupakan keputusan secara sadar dari KPM PKH untuk memilih keluar dengan sendirinya tanpa menunggu waktu habis komponen dan mampu secara ekonomi. Graduasi Mandiri menurut penulis penting sekali untuk mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak pemerhati kemiskinan, karena disaat banyaknya keluarga yang bukan peserta PKH

menginginkan jadi peserta penerima bantuan PKH, serta peserta PKH yang sudah menerima bantuan PKH tersebut tidak mau keluar dari kepesertaannya. Justru ada sebahagian KPM PKH yang menyatakan dirinya secara sadar dan suka rela untuk keluar dan tidak mau lagi menerima bantuan PKH.

Kartasasmita (2019) menjelaskan bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia sangat fokus pada upaya graduasi mandiri peserta PKH. Melihat dari jumlah KPM PKH yang telah graduasi mandiri meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017 jumlah KPM sejahtera mandiri sebanyak 230.351 keluarga dengan presentase 3,69% dari total peserta yang ada sebanyak 6.228.810 keluarga. Kemudian pada tahun 2018 terjadi graduasi mandiri sebanyak 621.789 keluarga dengan presentase 6,21% dari total peserta sebanyak 10.000.000 keluarga (https://mediaindonesia, diakses pada hari Selasa, 2 Juli 2019 Pukul 13.45 Wib).

Graduasi Mandiri yang terjadi pada KPM PKH di berbagai Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia, juga ada terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Tabel 1.2
GRADUASI MANDIRI
PESERTA PKH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Pesisir Selatan	24
2	Solok	2
3	Sijunjung	5
4	Kota Pariaman	0
5	Padang Pariaman	1
6	Agam	6
7	Solok Selatan	1
8	Tanah Datar	4
9	Lima Puluh Kota	286
10	Dharmasraya	18
11	Kota Solok	9
12	Kota Padang	29
13	Pasaman Barat	65
14	Payakumbuh	7
15	Pasaman	4
16	Kota Sawahlunto	0
17	Mentawai	0
18	Padang Panjang	1
19	Kota Bukittinggi	3
Jumlah		**465**

Sumber Data: Data Base PPKH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, Graduasi Mandiri peserta PKH yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat masih sedikit yaitu sebanyak 465 KPM yang menyatakan keluar secara suka rela (Graduasi Mandiri). Karena masih rendahnya angka Graduasi Mandiri yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota, maka penting sekali untuk menggenjot agar bisa terjadinya peningkatan angka graduasi mandiri tersebut. Mengingat bahwa salah satu indikator dari berhasilnya PKH adalah adanya terjadi Graduasi dari pesertanya. Peserta PKH di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten terbanyak terjadinya Graduasi Mandiri. Untuk melihat peserta PKH yang ada di Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada kolom Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
KONDISI PESERTA PKH KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

No	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	Graduasi Mandiri
1	Bukik Barisan	314	435	1469	1351	80
2	Harau	917	1313	2406	2253	66
3	Kapur IX	301	587	1297	1228	11
4	Lareh Sago Halaban	572	927	2084	1992	39
5	Luak	419	830	1452	1394	12
6	Mungka	231	439	946	910	9
7	Pangkalan Koto Baru	339	665	1421	1386	10
8	Payakumbuh	454	668	1666	1558	28
9	Situjuah Limo Nagari	388	415	1055	1025	2
10	Suliki	183	198	678	648	8
11	Akabiluru	465	654	1531	1494	4
12	Guguak	363	557	1081	1028	10
13	Gunuang Omeh	252	283	879	843	7
Jumlah		**5198**	**7971**	**17965**	**17110**	**286**

Sumber Data: Data Base PPKH Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.3, Terjadi penurunan Peserta PKH pada tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut terjadi karena adanya Graduasi, baik itu Graduasi Mandiri, Graduasi Alamiah, dan Garduasi mampu secara Ekonomi. untuk Graduasi Mandiri yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota terbanyak berada di Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan Harau. Penelitian yang dilakukan berada di Kecamatan Harau. Untuk melihat Kondisi Pesera PKH di Nagari selingkup Kecamatan Harau dapat dilihat pada kolam Tabel 1.4, sebagai berikut:

Tabel 1.4
KONDISI PESERTA PKH
KECAMATAN HARAU TAHUN 2019

No	NAGARI	2016	2017	2018	Sept 2019	Graduasi Mandiri 2019
1	Batu Balang	222	245	360	317	25
2	Bukik Limbuku	17	39	69	64	4
3	Gurun	14	28	58	59	1
4	Koto Tuo	44	90	200	210	0
5	Lubuak Batingkok	82	104	182	189	2
6	Harau	9	50	125	165	1
7	Pilubang	44	55	74	68	0
8	Sarilamak	291	384	625	588	18
9	Solok Bio-Bio	71	120	220	123	0
10	Taram	82	121	342	325	10
11	Tarantang	41	77	151	145	5
Jumlah		**917**	**1313**	**2406**	**2253**	**66**

Sumber Data: Data Base PPKH Kabupaten Lima Puluh Kota
Bulan September Tahun 2019

Berdasarkan hal tersebut, kemudian penulis menelusuri ke Sekretariat PPKH Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis menemukan adanya Surat Pernyataan pengunduran diri dari KPM PKH yang telah dibubuhkan tanda tangan yang disertai materai 6000 dan diketahui pihak Nagari serta Pendamping PKH (Observasi, 2019: 31 Juli 2019 Pukul 14.30 wib). Untuk itu, penting sekali dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang Graduasi Mandiri yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau.

PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memutuskan mata rantai kemiskinan dibuktikan dengan adanya terjadi Graduasi Mandiri. Maka, penelitian tentang Graduasi Mandiri PKH menjadi penting untuk dilakukan agar terjadinya perubahan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat miskin kedepannya.

Dalam program PKH ada suatu proses untuk melakukan pengakhiran kepada penerima bantuan program PKH. Proses ini dinamakan dengan tranformasi kepesertaan. Tranformasi kepesertaan ini merupakan bentuk kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi KPM PKH untuk menentukan KPM PKH berstatus Transisi atau Graduasi. Transisi disini adalah kondisi KPM PKH yang masih memenuhi persyaratan untuk tetap menerima bantuan karena masih memiliki kriteria komponen PKH dengan status ekonomi miskin, sedangkan Graduasi merupakan status KPM PKH tidak memenuhi lagi persyaratan untuk penerima bantuan PKH, baik itu disebabkan karena tidak memiliki kriteria komponen untuk dibantu, maupun karena status ekonomi yang sudah di anggap mampu (Pedoman Umum PKH, 2019: 48).

Status Graduasi bagi KPM PKH merupakan salah satu dari indikator dianggap berhasilnya program PKH. Kementrian Sosial dalam hal ini mengelompokkan Status Graduasi itu dalam tiga macam bentuk, diantaranya Graduasi Alamiah, Graduasi Mampu secara Ekonomi, dan Graduasi Mandiri atau suka rela yang disebabkan karena kesadaran dari pribadi KPM PKH untuk tidak menerima lagi bantuan PKH (Surat Kemensos RI Nomor: 384/LJS.JSK.TU/03/2017).

Bagi Bourdieu, bahwa untuk mengatasi posisi absurd antara individu dengan masyarakat perlu adanya proses konstruksi sosial yang digunakan oleh aktor untuk mempersepsikan, memikirkan, dan mengkonstruksi struktur (Ritzer, 2016: 577). Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi pada ranah sosial merupakan arena bagi perjuangan sumber daya.

Dalam suatu Arena ada perjuangan dan strategi, kekuatan-kekuatan serta seseorang harus memiliki banyak modal dan tidak memiliki modal. Modal bagi

Bourdieu merupakan konsentrasi kekuatan atau sumber daya yang ada. Modal merupakan suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam Arena. Setiap ranah atau arena menuntut seseorang untuk memiliki modal- modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di dalamnya. Modal ini mesti ada di dalam arena atau ranah tersebut, supaya arena tersebut dapat memiliki makna atau arti. Begitu juga halnya pada KPM PKH, semestinya peserta PKH ketika berada pada Arena PKH dalam melakukan tindakan sudah menyadarinya bahwa mereka memiliki modal yang banyak seperti modal sosial, modal simbolik, modal budaya dan modal ekonomi agar bisa cepat berhasil dalam berjuang dan bertarung pada arena PKH untuk mencapai status tertinggi tersebut yaitu Graduasi secara mandiri, begitu juga sebaliknya ketika KPM PKH yang tidak menyadarinya memiliki modal yang banyak dalam melakukan suatu tindakan pada Arena PKH, maka dia akan besar kemungkinannya bertahan dalam status Transisi. Modal ini semestinya merupakan suatu yang harus disadari ada dan dimiliki oleh individu dalam lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan orang untuk mengendalikan dirinya sendiri maupun orang lain (Ritzer, 2012: 907).

Modal ini mesti selalu diproduksi dan direproduksi kembali karena berfungsih sebagai relasi suatu sistem pertukaran baik itu dalam bentuk barang, materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi tertentu. (Harker, dkk, 2009: 17).

Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis Dominasi. Dalam hal ini, ketika KPM PKH memiliki modal yang banyak dalam bertindak pada arena PKH itu sendiri, maka KPM PKH akan mendominasi dalam melakukan setiap tindakannya, sehingga mampu mencapai status Graduasi secara mandiri. Tetapi, ketika KPM PKH tidak memiliki banyak modal, maka KPM PKH akan terdominasi dan bertahan pada status transisi yakni selalu bertahan dalam status penerima bantuan sosial kemiskinannya (Harker, dkk, 2009: 16).

Bagi penulis, Konsep Habitus, Modal, dan Arena yang diutarakan Bourdieu cocok untuk melihat Praktik Sosial yang terjadi pada KPM PKH dalam melakukan tindakannya untuk memperjuangkan status kepesertaannya. Asumsi

penulis, Habitus dan Modal merupakan berperan penting untuk mendorong individu, dalam hal ini adalah KPM PKH untuk merubah status kepesertaanya pada Arena PKH. Ketika Habitus dan Modal yang ada pada individu KPM PKH mampu mendorongnya kepada status Graduasi, maka KPM PKH dianggap berhasil dalam berjuang dan bertarung pada Arena PKH, begitu juga sebaliknya.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang menarik untuk terus dikaji secara ilmiah permasalahannya, agar bisa merubah kehidupan masyarakat miskin ke arah yang lebih baik. Program Keluarga Harapan yang disingkat dengan PKH merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kelas terbawah, dimana keluarga miskin sebagai peserta PKH ini merupakan kelas terbawah diantara golongan masyarakat miskin lainnya yang terdapat pada Basis Data Terpadu (Daud, 2018: 30-31). Oleh karena itu, PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini peserta PKH, mengubah perilaku peserta PKH untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi agar terjadinya Graduasi secara Mandiri.

Untuk menuju keberhasilan PKH tersebut, maka Kementrian Sosial menargetkan Satu Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tergraduasi terutama Graduasi secara Mandiri pada tahun 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Kartasasmita (2019) bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia sangat fokus pada upaya graduasi mandiri peserta PKH. Melihat jumlah KPM PKH yang telah graduasi mandiri meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017 jumlah KPM sejahtera mandiri sebanyak 230.351 keluarga dengan presentase 3,69% dari total peserta yang ada sebanyak 6.228.810 keluarga. Kemudian pada tahun 2018 terjadi graduasi mandiri sebanyak 621.789 keluarga dengan presentase 6,21% dari total peserta sebanyak 10.000.000 keluarga (https://mediaindonesia, diakses pada hari Selasa, 2 Juli 2019 Pukul 13.45 Wib).

Ketika berbicara Graduasi, maka Kementerian Sosial dalam hal ini mengelompokkan Status Graduasi itu dalam tiga macam bentuk, diantaranya

Graduasi Alamiah, Graduasi Mampu secara Ekonomi, dan Graduasi Mandiri atau suka rela yang disebabkan karena kesadaran dari pribadi KPM PKH untuk tidak menerima lagi bantuan PKH (Surat Kemensos RI Nomor: 384/LJS.JSK.TU/03/2017).

Graduasi Mandiri bagi penulis penting sekali untuk mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak pemerhati kemiskinan, karena disaat banyaknya keluarga yang bukan peserta PKH menginginkan jadi peserta penerima bantuan PKH, serta peserta PKH yang sudah menerima bantuan PKH tersebut tidak mau keluar dari kepesertaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator SDM PKH Kabupaten Lima Puluh Kota Saudara FR:

> PKH merupakan bantuan sosial yang menarik sekali bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat yang datang ke Sekretariat PPKH di Dinas Sosial, bahkan ada sampai menghadang pendamping PKH sewaktu bertugas di lapangan untuk meminta jadi peserta PKH dan mengaku-ngaku keluarganya hidup susah, menyekolahkan anak susah, anaknya banyak tapi tidak dapat PKH. Kemudian ada juga peserta PKH yang sudah lama jadi penerima manfaat PKH, namun tidak mau keluar dari status kepesertaan. Bahkan mereka sangat menikmati bantuan PKH. Sehingga masih banyak diantara mereka masih mengaku miskin. Bahkan ketika ada pertemuan bulanan diadakan di rumahnya mereka menyembunyikan sepeda motor, menutupi TV-nya dengan kain sampai tertutup, dan menyembunyikan perabot rumah tangga yang dianggap agak mewah dikalangan masyarakat kampung ke kamar pribadinya seperti menyembunyikan Sofa, dan kulkas (Wawancara, 13 Agustus 2019 Pukul 15.30 Wib)

Walaupun banyak masyarakat yang menginginkan jadi peserta PKH, dan Peserta PKH yang sudah berada didalamnya banyak mempertahankan status kepesertaanya dengan berbagai macam strategi yang digunakannya seperti yang disampaikan oleh Koordinator SDM PKH tersebut, begitu juga dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Casiavera pada Tahun 2017. Walaupun demikian, namum masih ada sebahagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH yang menyatakan dirinya secara sadar dan suka rela untuk keluar dan tidak mau lagi menerima bantuan PKH. Fenomena seperti ini dikenal dalam PKH dengan sebutan Graduasi Mandiri.

Bagi penulis, Graduasi Mandiri ini menarik sekali untuk ditelusuri dan diteliti lebih lanjut dibandingkan dengan dua kategori Graduasi lainnya, karena Graduasi Alamiah untuk keluar dari kepesertaan PKH perlu menunggu waktu habis komponen bantuan, dan Graduasi mampu secara ekonomi menunggu meningkatnya perekonomian peserta sampai dinyatakan mampu oleh pihak program, sedangkan Graduasi Mandiri merupakan keputusan secara sadar dari KPM PKH untuk memilih keluar dengan sendirinya tanpa menunggu waktu habis komponen dan mampu secara ekonomi.

Maka, untuk membuktikannya penting dilakukan penelitian agar mendapatkan jawaban *"Bagaimana Praktik Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk Graduasi Mandiri dari Status Kepesertaan?"*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara Umum penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan Praktik Sosial yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk Graduasi Mandiri dari status kepesertaan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah:

a. Mengidentifikasi peran habitus dalam mendorong keluarga penerima manfaat PKH untuk graduasi mandiri dari status kepesertaanya.
b. Mendeskripsikan bentuk-bentuk modal yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk graduasi mandiri dari status kepesertaanya.
c. Mendeskripsikan peran arena PKH kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk graduasi mandiri dari status kepesertaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pelaksanaan bantuan sosial PKH dan bantuan sosial lainnya yang bersifat pemberdayaan agar terjadinya lebih banyak kesadaran individu yang muncul dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program penanganan kemiskinan untuk keluar dari rantai kemiskinan yang membelenggunya.

b. Menjadi acuan bagi penelitian sejenis pada masa mendatang, terutama penelitian yang berhubungan dengan bantuan sosial bersyarat pemerintah dalam menjawab ketidakmampuan program mengeluarkan secara mandiri atau suka rela KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program.

c. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan Kesejahteraan Sosial dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan penerima bantuan program penanganan kemiskinan

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi pemikiran, masukan dan strategi kepada PPKH dan Pendamping Sosial PKH dalam pelaksanaan program yang lebih baik lagi agar lebih banyak terjadi kesadaran individu yang muncul dari KPM PKH untuk tidak bergantung kepada PKH secara terus menerus.

b. Memberikan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang tepat bagi pemerintah dan pelaksana program dalam rangka penurunan angka kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.